

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (2017). *Pengaruh pengawasan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai sipil pada UPT Puskesmas Pardasuka Pringsewu* (Skripsi). IBI Darmajaya.
- Al Baiti, N. J., & Soemitra, A. (2022). *Evaluasi pemberantasan korupsi dan penguatan pencegahan pemberantasan korupsi di Kota Medan*. *Jurnal Administrasi Modern*, 1(2), 129–136. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jambd/article/view/2310/1856>
- Ali, M. (2015). *Governance and good governance: A conceptual perspective*. *Dialogue* (Pakistan), 10(1).
- Annisa. (2023, November). *Pengertian good governance, ciri dan prinsipnya*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>
- Awaliah, K. N. (2023). *Fraud triangle theory: Pendekatan strategis dalam mendeteksi korupsi dan kecurangan pada laporan keuangan publik*. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1493–1495. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/9023/4134>
- Barley, I. (2013). *Implementasi amanat Pembukaan UUD 1945 guna perencanaan pembangunan nasional dalam rangka tujuan nasional*. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011107/swf/2757/mobile/index.html#p=2>
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2024). *Profil ketenagakerjaan Kota Depok: Hasil Sakernas Agustus 2024*. BPS. <https://depokkota.bps.go.id/en/publication/2025/05/27/7ed5d3b4e0db5f79fa66b377/profil-ketenagakerjaan-kota-depok-hasil-sakernas-agustus-2024.html>
- Dewi, A. (2023, September 12). *Demokrasi: Pengertian, sejarah dan contohnya*. Program Pascasarjana UMSU. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>
- Fathin, M. Q., Safitri, A., Nurpadilah, F. H., Renova, D., & Darmawan, I. (2024). *Dampak pengawasan pemerintah terhadap pencegahan korupsi pada kasus Wali Kota Cimahi*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(3), 302–305. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12633209>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). *Implementasi good governance di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 11(1), 2–9.
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). *Dinamika demokrasi dalam kebijakan publik: Tantangan dan peluang bagi sistem hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(4), 341–352.
- Hartanto, E. (2024). *Evaluasi kebijakan KPK dalam pencegahan korupsi di Indonesia (studi kasus: Program Monitoring Center for Prevention)*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 13(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/46008>
- Hidayah, A. L. (2023, April). *5 prinsip good governance dalam pengurusan piutang negara*. DJKN Kemenkeu. <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062>

- Hidayat, E. (2021). *Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Sampang*. Jurnal Kebijakan Publik, 1(3), 129–131.
- Hakim, M. A. L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2022). Diskursus kebijakan kepemudaan dalam perspektif behavioralisme dan neo-institusionalisme (Pendahuluan studi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Cianjur). *Jurnal Education and Development*, 10(3), 81–84.
- Indonesia Corruption Watch. (2024, Mei). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*.
<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20laporan%20hasil%20pemantauan%20tren%20korupsi%20tahun%202023.pdf>
- Inspektorat Banda Aceh. (2024, Mei 10). *Luncurkan MCP 2024, KPK dorong percepatan pencegahan korupsi di Pemda*.
- Irfan Setiawan, & Widowati Johannes, A. (2024). *Pengawasan pemerintahan: Dalam ulasan teori dan praktek*. CV Rtujuh Media Printing.
- Jaga.id. (n.d.). *Portal transparansi KPK*. <https://jaga.id/>
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Indonesia Open University. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik
- Katadata. (n.d.). *Penduduk Kota Depok berpendidikan tinggi pada akhir 2024*.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7e2e89431d7d7b2>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Portal resmi KPK RI*.
<https://www.kpk.go.id/>
- Kristanti, D., & Hidayati, N. (2024). *Pengaruh Monitoring Center for Prevention dan inventarisasi aset terhadap efektivitas pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kediri*. Otonomi, 24(1), 153–161.
<https://doi.org/10.32503/otonomi.v24i1.5772>
- Mardiasmo, D., Barnes, P., & Sakurai, Y. (2008). *Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: The challenges*.
<https://eprints.qut.edu.au/14727/1/14727.pdf>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). *E-government dan korupsi: Studi di pemerintah daerah Indonesia dari perspektif teori keagenan*. Ekuitas, 5(1), 41–50.
<https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/4789/543>
- Ni'am, S., & Santosa, B. (2023). *Skor Indeks Persepsi Korupsi merosot ke 34 poin, ICW sebut Indonesia sebagai negara korup*. Kompas.com.
- Nofianti, L. (2019). *Kajian terhadap pengukuran governance: Indikator dan prinsip governance*.
- Nuruddin, M., & Rahmawati, I. P. (2021). *Fraud triangle dan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, 12(1), 110–122.
- Pattimau, A. (2024). *Analisis implementasi monitoring dan evaluasi dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Kupang*. Jurnal Ilmu Governance dan Etika, 5(2), 1432–1440. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2685>
- Pemerintah Kota Depok. (2021). *Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah*.

- Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi publik sebagai instrumen mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi*. Jurnal Administrasi Publik, 2(3), 230–236.
- Putri, D. (2021). *Korupsi dan perilaku koruptif*. Jurnal Administrasi, 5(2), 48–53.
- Rasul, S. (2009). *Penerapan good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi*. Jurnal Mimbar Hukum, 2(3), 539–542. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16276/10822>
- Sinaga, C. B. A. (2025). *Peran organisasi pendidikan nonformal melalui perspektif neo-institutionalism (Studi kasus: Organisasi Desa Pendidikan FISH UNJ tahun 2024 di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur)*. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.
- Sitepu, H. N. B. (2020). *Pengaruh pengawasan dan kepuasan kerja terhadap disiplin kerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo (Skripsi)*. Universitas Quality.
- Transparency International. (n.d.). Official website of Transparency International. <https://www.transparency.org/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah menggunakan teori fraud triangle*. OWNER, 6(1), 1016–1017. <https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/710/326>
- Widanti, N. P. T. (2022). *Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur*. Peradaban, 3(1), 80–83. <https://jurnal.abdimas.id/index.php/peradaban/article/view/11/11>
- Yalia, M. (2014). *Implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial media tradisional di Jawa Barat*. Patanjala, 6(1), 149–160.